

# Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value For Money* Padarsud Djoelham Binjai

Yuni Shara\*, Debbi Chyntia Ovami, Rindhira Humairah

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

Email: <sup>1,\*</sup>yunishara146@gmail.com, <sup>2</sup>debbichyntia@gmail.com

**Abstrak**—Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money di RSUD Djoelham Binjai, (2) Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money di Djoelham RSUD Binjai, (3) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money di RSUD Djoelham Binjai. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dipilih melalui metode purposive sampling yaitu 69 karyawan di RSUD Djoelham Binjai. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money di RSUD Djoelham Binjai, (2) Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money. di RSUD Djoelham Binjai, (3) Secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money di RSUD Djoelham Binjai.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Transparansi; Kinerja Anggaran; Konsep Value for Money

**Abstract**—The objective of this research was to determine (1) The Effect of Accountability on Budget Performance with the Concept of Value for Money at Djoelham Binjai Regional Hospital, (2) The Effect of Transparency on Budget Performance with the Concept of Value for Money at Djoelham Binjai Regional Hospital, (3) The Effect of Accountability and Transparency on Budget Performance with the Concept of Value for Money at Djoelham Binjai Regional Hospital. This research design was to use quantitative methods. The sample was selected through a purposive sampling method, namely 69 employees at Djeolham Binjai Regional Hospital. The data collection technique used a questionnaire. The data analysis techniques used were validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple regression analysis and hypothesis testing. The results showed that (1) Accountability had a positive and significant effect on budget performance with the concept of value for money at Djoelham Binjai Hospital, (2) Transparency had no significant effect on budget performance with the concept of value for money. at Djoelham Binjai Hospital, (3) Simultaneously accountability and transparency had a positive and significant effect on budget performance with the concept of value for money at Djoelham Binjai Regional Hospital.

**Keywords:** Accountability; Transparency; Budget Performance; Value for Money Concept

## 1. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan *Good Governance* perubahan terus dilakukan pada sektor pemerintahan. Hal ini sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah dan didukung dengan berubahnya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, selain itu membawa kosekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif dan efisien. Dengan pengalokasian dana yang baik, maka akan berimplikasi pada pembangunan daerah yaitu dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), ada beberapa indikator yang harus diterapkan oleh organisasi publik antara lain adalah dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran (Setiyanningrum, 2017).

Pengelolaan anggaran lebih mengutamakan penerapan anggaran dibandingkan melakukan penghematan dana anggaran sehingga banyak anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak terjadi efisiensi anggaran dan tidak tepat sasaran. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019, terdapat permasalahan yang terjadi di RSUD Djoelham Binjai yaitu, proses pembuatan laporan pertanggungjawaban lambat dikarenakan jajaran manajemen RSUD belum memahami mekanisme pengelolaan keuangan sehingga pelaporan tidak tepat waktu. Selain itu, terjadi kekurangan pembiayaan pada setiap bidang di RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai. Hal ini memperlihatkan, bahwa penggunaan anggaran dalam beberapa periode efisien dan efektif. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) RSUD Djoelham Binjai tahun 2017-2019, dilakukan pengukuran *value for money* yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut

**Tabel 1.** Pengukuran Value for Money RSUD Djoelham Binjai Tahun 2017, 2018 dan 2019

<i>Value for money</i>	Tahun		
	2017	2018	2019
Ekonomi	77,71%	98,6%	89,6%
Efisiensi	99,9%	101,95%	94,8%
Efektivitas	67,8%	96,6%	92,05%

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1, Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama, karena di satu sisi, pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi hasil atau *output* tidak sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan (tidak efektif). Begitu juga sebaliknya, pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sudah efektif dalam mencapai tujuan, akan tetapi dicapai dengan cara tidak ekonomis dan efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukannya pengukuran kinerja dengan konsep *value for money*. Menurut Rini (2013) *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik, artinya kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan semata, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Anggaran yang baik akan menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi karena memuat suatu keluaran yang diinginkan. Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian: “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada RSUD Djoelham Binjai”.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Kinerja Anggaran**

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (PP Nomor 58 Tahun 2005). Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 37 kinerja adalah hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang bertumpu kemampuan sumber daya daerah dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Anggaran tersebut disusun berdasarkan tingkat kebutuhan yang riil dan terukur dengan memperhatikan tingkat kemampuan pembiayaan/dana yang tersedia. Dengan demikian anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya *input* yang ditetapkan (Pasal 8 PP 58/2005).

### **2.2 Value for Money**

Value for Money merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for Money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Iswahyudi et al. 2016). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata. Artinya penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata (Mardiasmo 2018). Mahmudi (2018), Konsep value for money terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

1. Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang / kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa dalam perolehan sumber daya input tidak terjadi pemborosan.
2. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output.
3. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai.

### **2.3 Akuntabilitas**

Mardiasmo (2018), akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Wahida, 2015). Menurut Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

### **2.4 Transparansi**

Tahir (2014) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena salah satu elemen penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya pengelolaan anggaran yang baik. Transparansi menjadi salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PP 58 / 2015, sekaligus dapat menjadi kunci penyelenggaraan asas-asas lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di dalam Kerangka Konseptual (KK), menyatakan bahwa: “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada RSUD Djoelham Binjai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai RSUD Djoelham Binjai yang terdiri dari 309 orang. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 69 orang pegawai RSUD Djoelham Binjai yang tergabung dalam pejabat struktural dan pejabat fungsional umum. Variabel bebas penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan, variabel terikat penelitian ini adalah Kinerja Anggaran dengan konsep *value for money*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini adalah skala likert. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 2.** Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.365 <sup>a</sup>	.133	.107	5.126

a. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS

b. Dependent Variable: KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2 hasil uji koefisien determinasi (*R square*) dan diperoleh nilai *R square* (R<sup>2</sup>) sebesar 0,133 atau 13,3%. bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* hanya sebesar 13,3%. Pengaruh yang diberikan masing-masing variabel amat terbatas karena nilai R<sup>2</sup> kecil. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas dan transparansi di RSUD Djoelham Binjai dikategorikan kurang baik karena hanya memberikan pengaruh sebesar 13,3% terhadap kinerja anggaran. Sedangkan Sisanya sebesar 86,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel pengawasan, ketepatan waktu dan partisipasi anggaran.

#### 4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 3.** Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	38.732	8.786		4.408	.000
Akuntabilitas	.459	.166	.321	2.773	.007
Transparansi	.314	.267	.136	1.174	.245

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y=38,732+0,459X_1 + 0,314X_2 + e$$

#### 4.3 Uji t (Uji Secara Parsial)

##### 1. Uji hipotesis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*

Hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) menyatakan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 ( $0,007 < 0,05$ ) maka hipotesis pertama diterima, artinya akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*.

##### 2. Uji hipotesis pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 ( $0,245 > 0,05$ ) maka hipotesis kedua ditolak, artinya transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*

#### 4.4 Uji F (Uji Secara Simultan)

Hasil uji hipotesis secara simultan (uji f) dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4.** Uji Secara Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	265.971	2	132.985	5.061	.009 <sup>b</sup>
Residual	1734.232	66	26.276		
Total	2000.203	68			

a. Dependent Variable: KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY  
 b. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS

Sumber: Data Diolah, 2020

Secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 ( $0,009 < 0,05$ ) maka hipotesis ketiga diterima.

#### 4.5 Pembahasan

##### 1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada RSUD Djoelham Binjai

Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas di RSUD Djoelham Binjai, maka semakin baik pula kinerja anggaran. Akuntabilitas merupakan upaya pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan oleh suatu instansi. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas. Oleh sebab itu, RSUD Djoelham Binjai harus tetap meningkatkan dan mempertahankan prinsip akuntabilitas agar dapat menjadikan RSUD Djoelham Binjai lebih baik lagi. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian Victorinus Laoli (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Peningkatan akuntabilitas akan mendorong hasil kinerja anggaran yang lebih ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, terdapat penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini. Penelitian Arifani, dkk (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

##### 2. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada RSUD Djoelham Binjai

Variabel transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja anggaran dengan konsep *value for money*.  $H_2$  ditolak sehingga variabel transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan RSUD Djoelham Binjai dalam hal kinerja anggaran. Dalam hal ini sering kali muncul masalah berupa adanya informasi yang tidak dimiliki secara sama oleh tiap-tiap pihak. Instansi sektor publik memiliki informasi lebih banyak mengenai kinerja anggaran yang sesungguhnya, sedangkan masyarakat hanya memperoleh informasi kinerja secara terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Pemberian informasi mengenai kinerja organisasi sektor publik kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor publik. Selain itu, hal ini disebabkan oleh transparansi bukan merupakan indikator pokok dalam mewujudkan akuntabilitas sehingga memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Untuk mewujudkan kinerja anggaran yang baik terdapat beberapa indikator seperti kewajaran, kepercayaan, keseimbangan, konsekuensi dan konsistensi. Oleh karena itu, disarankan kepada RSUD Djoelham Binjai untuk meningkatkan penerapan prinsip transparansi karena transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam artian informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Victorinus Laoli (2019) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Selain itu, terdapat penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini, yaitu penelitian Sudewi, dkk (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.

##### 3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada RSUD Djoelham Binjai

$H_3$  diterima dan dapat diartikan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Hal ini berarti secara bersama-sama

akuntabilitas dan transparansi memberi pengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Menguatnya tuntutan akuntabilitas, membuat instansi harus bekerja secara akuntabel, yaitu mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai pelaksanaan program dan penyerapan anggaran yang telah berjalan. Dalam upaya mewujudkan kinerja anggaran yang baik instansi bukan hanya menekankan prinsip akuntabilitas tetapi juga harus menekankan prinsip transparansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Victorinus Laoli (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hal ini harus dipertahankan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pengelolaan kinerja dan menjadikan RSUD Djoelham Binjai yang akuntabel, transparan, ekonomis, efektif dan efisien.

## 5. KESIMPULAN

Dari penelitian dapat diberikan kesimpulan, yaitu:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada RSUD Djoelham Binjai. Semakin baik penerapan prinsip akuntabilitas di RSUD Djoelham Binjai, maka semakin baik pula kinerja anggaran.
2. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada RSUD Djoelham Binjai. Penerapan prinsip transparansi di RSUD Djoelham Binjai tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran
3. Secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada RSUD Djoelham Binjai.

Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan *performance based budgeting*, pada penelitiannya. *performance based budgeting* dianggap lebih baik digunakan, namun tetap harus didukung dengan sumberdaya manusianya yang andal, Oleh karena itu, pemerintah bisa melakukan Training secara intensif dan berkelanjutan. Sosialisasi aturan-aturan baru dari deregulasi kepada setiap pegawainya.

## REFERENCES

- Arifani,dkk. 2018. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (studi empiris pada Pemerintah Kota Jayapura)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*. Vol 13, (1), 68-82.
- Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono dan M. Achsin. 2016. "Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance". *Jurnal Ilmiah Akuntansi 1* (2).
- Laoli, Victorinus, 2019. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Pemerintah Kabupaten Nias". *Riset dan Jurnal Akuntansi*. Vol 13 Nomor 1.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi,2018. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Revisi. UPP STIM Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rini & Caesariza. 2013. "Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan Konsep *Value for Money*". *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. April 2013, Volume 14 Nomor 1.
- Setyaningrum, Irna. 2017. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep *Value for Money* Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta". *Jurnal Profita Edisi 3 Tahun 2017*.
- Sudewi, dkk. 2017. "Pengaruh akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *value for money* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. *e-JournalSI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 8, (2).
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press